

Konsep “Ekskursi”, Kandas tak Berbekas?

Wahyu Purwiyastuti^{1*}

¹Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

*e-mail: wahyu.purwiyastuti@uksw.edu

Article history: Received 11 October 2021; Accepted 04 March 2022; Available online 01 April 2022

Abstrak

Nugroho Notosusanto merekomendasikan agar siswa SMP melakukan “ekskursi” ke tempat bersejarah di daerah masing-masing. Sejarah perlu dikisahkan dengan cara yang “hidup” dan “menarik”. Metode penelitian dilaksanakan dengan cara menentukan topik “ekskursi”, kemudian menelusuri sumber primer dan sekunder, mengkritik data untuk memperoleh validitas. Semua sumber sejarah diinterpretasi lalu ditulis sebagai historiografi. Hasil riset menunjukkan sejarah merupakan alat penting untuk memperkuat spirit nasionalisme dan patriotisme. Konsep “ekskursi” yang diperkenalkan Nugroho Notosusanto semasa Orde Baru, belum tuntas didefinisikan. Seolah kandas tak berbekas, namun jejaknya masih terlacak. Perlu ada keberanian dari masyarakat akademik (sejarawan) untuk menelaah ulang konsep “ekskursi” kemudian dipertimbangkan untuk mengaktifkannya lagi.

Abstract

Nugroho Notosusanto recommended that junior high school students had to go on “excursions” to historical places in their respective areas. History needs to be told in a “live” and “interesting” way. The research method is carried out by determining the topic of “excursion”, then looking for primary and secondary sources, after that criticizing the data to find validity. All historical sources are interpreted and then then written as historiography. The results show that history are an important tool to strengthen the spirit of nationalism and patriotism. The concept of “excursion” which was introduced by Nugroho Notosusanto during the New Order, has not been completely defined. As if aground without a trace, but the traces are still traced. There needs to be the courage by academic community (historians) to re-examine the concept of “excursion” and then consider activating it again.

Kata Kunci:

Ekskursi; Pesona
Perlawatan;
Nasionalisme;
Nugroho Notosusanto

Keywords:

Excursion; *Pesona*
Perlawatan;
Nationalism; Nugroho
Notosusanto

Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Nugroho Notosusanto berpendapat bahwa sejarah di Indonesia (sekitar tahun 1960-an) belum populer dibanding negara lain yang sudah memiliki tradisi penulisan sejak lama. Kata “sejarah” didefinisikan sebagai peristiwa dan kisah. Sejarah sebagai peristiwa tidak mungkin diamati atau disaksikan lagi secara langsung. Namun, sejarah sebagai kisah akan selalu dihadapi oleh manusia. Peristiwa masa lalu meninggalkan jejak, dan berdasarkan jejak tersebut sejarawan menyusun kisahnya (Notosusanto, 1964). Pada masa Orde Baru, pelajaran sejarah digunakan sebagai infrastruktur mewujudkan pembangunan. Terdapat agenda mobilisasi konsensus keseragaman fakta sejarah, membangun *image* nasional dalam konteks “tunggal”. Hal tersebut dideskripsikan di halaman prakata, buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) untuk tingkat SMP

kelas III, dikonstruksi dalam kepentingan mewujudkan integrasi nasional yang kokoh dan langgeng (Notosusanto, 1978). Pendidikan didesain menggunakan konsep *brainwashing* agar guru tidak kritis dan tidak memiliki otonomi sikap politik yang berlawanan dengan pemerintah. Substansi pelajaran sejarah rawan dimanfaatkan sebagai infrastruktur strategis mengkonstruksi narasi bangsa. Pancasila merupakan salah satu tema penting yang dibahas pada beberapa bidang ilmu atau mata pelajaran. Baik mata pelajaran sejarah maupun Pendidikan Moral Pancasila (PMP), keduanya mempelajari Pancasila dengan konteks kepentingan pembinaan anak didik sebagai warga negara (Umasih, 2014).

Dalam kajian historiografi di Indonesia, Sartono Kartodirdjo menjelaskan bahwa pengajaran sejarah di sekolah berkontribusi memberi pengetahuan material, seperti mewujudkan transformasi kehidupan politik menuju modernitas, menanamkan sivilisasi, membentuk kepribadian nasional, dan pengetahuan *civic* untuk pembangunan nasional. Pendidikan *civic* mendapat dukungan substantif dari pelajaran sejarah. Agenda tersebut dimanfaatkan untuk membantu melahirkan gambaran sifat dan hakikat negara. Kebutuhan melengkapi karakteristik dan identitas negara dipenuhi melalui aktifitas pengetahuan kesejarahan bangsa. Sartono menekankan pentingnya memupuk pengetahuan tentang riwayat pengalaman bersama pada masa lampau sehingga mewujudkan identitas bangsa (Kartodirdjo, 2017).

Akhir tahun 2020 lalu, "sejarah" kembali diragukan relevansi dan kedigdayaannya. Berkembang wacana bahwa mata pelajaran sejarah akan "keluar" dari kurikulum nasional. Mata pelajaran sejarah Indonesia tidak lagi menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa SMA/ sederajat kelas X, posisinya akan digabung dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). (Nurita, 2020) Kegaduhan itu menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Totok Suprayitno, menegaskan Isu penghapusan mata pelajaran sejarah berkembang setelah beredarnya *file* sosialisasi Kemendikbud tentang penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional yang akan diterapkan Maret 2021. Sejak diterbitkan kebijakan kurikulum 2013 hingga kini, mata pelajaran Sejarah Indonesia dipelajari secara khusus, terpisah dari mata pelajaran lainnya. Posisi mata pelajaran sejarah tetap ada dalam struktur kurikulum, mengingat sejarah merupakan infrastruktur esensial bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang termuat dalam pelajaran sejarah menjadi prioritas untuk mengembangkan karakter bangsa.

Penyelenggaraan pengajaran sejarah di Indonesia, menurut Sardiman, terlalu dominan pada aspek kognitif, beban materi yang dipelajari siswa terlalu berat, dan minim pendidikan karakter. Padahal, pembelajaran sejarah dengan secara efektif-inovatif dipercaya mampu mengembangkan kecerdasan sejarah dalam rangka memperkuat kesadaran sejarah. Sardiman merekomendasikan metode *discovery-inquiry*, *values exploration* dan *Value Clarification Technique* (VCT) untuk mencapai tujuan pendidikan nilai (Sardiman, 2015). Bambang Purwanto merekomendasikan pendidikan sejarah seharusnya digunakan untuk membangun karakter kebangsaan melalui "logika". Konstruksi historis dapat dihasilkan oleh peran personal atau kelompok. Ide, gagasan, atau pemikiran tokoh dapat dikonsumsi sebagai elemen inti membangun "logika". Siswa dilatih untuk memaknai sejarah, baik dalam perspektif peristiwa, kisah, atau seni ketrampilan berpikir (Purwanto, 2021). Dalam konteks lain, Caroline Hoefflerle menawarkan gagasan praksis pengajaran sejarah yang sesuai bagi siswa kelas menengah dan atas, yaitu dengan cara mengatur siswa agar tertarik mempelajari sejarah. Siswa diminta menyiapkan daftar buku filsafat sejarah yang cukup panjang, karya berbagai kalangan sejarawan. Teknik pembelajaran dilakukan dalam bentuk seminar, tidak membutuhkan waktu di sepanjang pertemuan tatap muka, tanpa adanya petunjuk cara membaca buku, atau bagaimana mereka harus membaca buku. Masing-masing siswa secara mandiri diminta menemukan sendiri cara mendalami substansi buku berdasarkan gaya dan kemampuannya (Hoefflerle, n.d.).

Strategi Caroline Hoeffler yang berani mengabaikan aspek ujian/tes untuk mengarahkan fokus pada partisipasi aktif “kelas” ternyata bertujuan “menghadirkan perasaan”. Teori dan historiografi diposisikan sebagai unsur penting meningkatkan pembelajaran sejarah. sebagai ilmu, maka hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menyiapkan rencana pembelajaran dan mengatur ulang cara memahami materi. Historiografi juga diargumentasikan sebagai aspek fundamental untuk memahami sejarah serta profesi sejarawan. Historiografi bukan hanya sebagai pencerahan bagi siswa memahami narasi sejarah dari dalam (*insight*) tetapi juga turut “menghidupkan sejarah” sehingga tertarik untuk memahaminya. Ini juga menjadi pilihan Caroline untuk menekankan pentingnya berpikir kritis dalam pembelajaran sejarah (Hoeffler, n.d.).

Berpijak pada temuan riset terdahulu, dapat dipahami bahwa sejarah merupakan elemen fundamental bagi bangsa dan negara. Namun, mengapa sejarah masih diragukan kedigdayaannya? Apa guna sejarah? Mengapa “ekskursion” penting bagi pengajaran sejarah dan perlu dilakukan oleh siswa SMP? Riset ini diposisikan untuk menjawab persoalan tersebut. Metode “ekskursion” yang dicetuskan oleh Nugroho Notosusanto diargumentasikan berpeluang menghadirkan keseimbangan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik pengajaran sejarah bagi siswa SMP.

Sejarah sebagai “peristiwa” hanya sekali terjadi, diformulasikan dalam bentuk kreatifitas inovatif berupa seni ketrampilan berpikir yang futuristik. Saat kedigdayaan sejarah kembali disangsikan, diperlukan strategi membangun kultur berpikir sejarah dengan cara mengkoneksikan letupan peristiwa dengan struktur logis. Infrastruktur dan sarana membangun kreatifitas intelektual pun penting untuk dipahami dan dimanifestasikan oleh semua kalangan terutama guru dan siswa. Siswa memerlukan kerangka berpikir bahwa sejarah memiliki kegunaan sebagai “keilmuan” dan juga punya “nilai” atau *value*. Sementara, kebutuhan guru sejarah dalam menguasai kemampuan “logika” dapat diakomodasi dan dipertajam melalui literasi, mencerna dan mereproduksi narasi kesejarahan.

2. Metode

Metode penelitian diterapkan melalui beberapa tahap, pertama menentukan topik “ekskursion”; kedua menelusuri sumber primer maupun sekunder secara daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan). Langkah ketiga melakukan kritik sumber untuk memperoleh validitas. Keempat, semua sumber sejarah diinterpretasi dan tahap berikutnya ditulis sebagai historiografi (Kuntowijoyo, 2013).

Pendekatan yang dipilih dalam riset ini adalah sejarah mentalitas dan intelektual yang menurut Sartono Kartodirdjo mengutamakan bagaimana ide atau semangat mempengaruhi proses sejarah. Ide dan aksi saling berinteraksi, tidak terdapat kesan bahwa ide hidup dan tumbuh secara otonom dalam kehidupan manusia. Justru sikap, peranan, dan kelakuan manusia yang diutamakan. Segala sesuatu yang diciptakan manusia, yang berbentuk kebudayaan merupakan ekspresi dari yang terjadi dalam mental orang. Masalah kesadaran sangat penting sebagai unsur penggerak atau pencipta fakta sejarah. Pikiran, ide, kepercayaan, angan, dan segala macam unsur kesadarannya (Kartodirdjo, 1992).

Pendekatan mental dan intelektual relevan untuk menelaah objek formal konsep “ekskursion”. Wujud ideasional yang dikonstruksi memuat perspektif nasionalisme produk Indonesiasentris. Istilah “ekskursion” sengaja digunakan dalam narasi artikel ini dengan harapan tidak menghilangkan konteks asli sebagaimana telah dikonstruksi oleh Nugroho Notosusanto dan tim penulis SNI untuk SMP jilid I sampai III. Sementara, penyajian dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), diksi “ekskursion” dengan format huruf “X” diserap menjadi huruf “Y”. Proses tersebut tidak berdampak menghilangkan makna kata.

3. Hasil dan Pembahasan

Diksi “ekskursioner” atau “ekskursioner”, artinya perjalanan untuk bersenang-senang (<https://kbbi.web.id/ekskursioner>, n.d.). Wisatawan dalam kategori pariwisata semacam itu disebut *excursionist*. (Inskeep, 1991) Berdasarkan aspek penyelenggaraan, “ekskursioner” berlangsung singkat, kurang dari 24 jam. Konsep “ekskursioner” yang didefinisikan dalam kepariwisataan bertolak dari akar filosofi maupun unsur praktik bidang ilmu ekonomi. Suatu perjalanan wisata dikonstruksi melalui perencanaan pariwisata secara matang. Dalam cakupan nasional, regional, komunitas, dan resor, perencanaan mulai berkembang sejak tahun 1950-an ketika pariwisata akan menjadi aktivitas sosial ekonomi yang signifikan dan berdampak. Pada tahun 1959, di kawasan Asia Pasifik, memasukkan pariwisata sebagai komponen utama dan progresif untuk mengintegrasikan perencanaan pariwisata ke seluruh kawasannya. Kondisi itu berlangsung hingga tahun 1960-an sampai 1970-an, luas jaringan diperlebar koneksinya dengan Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Taiwan, Malaysia, Bali, Fiji, Polinesia, Perancis, Great Barrier Reef, dan Australia Tengah (Inskeep, 1991).

Selama tahun 1980-an, perencanaan pariwisata di kawasan internasional makin berkembang, konsepnya dikoneksikan dengan agenda pembangunan di masing-masing negara. Perencanaan pariwisata tidak mengabaikan perkembangan yang ada, di antaranya dalam hal keterbukaan mengadopsi unsur-unsur modernitas. Maka, kehadiran hotel, resor, sarana transportasi yang menarik, dan situs bersejarah disiapkan untuk merespons perkembangan. Perencanaan pariwisata juga melahirkan definisi turis dan konsep sistem pariwisata. Definisi turis yang disetujui dan diterima publik adalah yang direkomendasikan oleh *United Nation Conference on International Travel and Tourism* tahun 1963 (Inskeep, 1991:18-19).

Definisi maupun pemikiran konsep “ekskursioner” yang dikenalkan oleh Nugroho Notosusanto tidak eksplisit merujuk pada bidang kepariwisataan atau kesejarahan. Penjelasan dan prosedurnya juga tidak ditemukan di dalam narasi buku SNI untuk SMP yang terbit tahun 1976. Oleh karena itu, terdapat kesan seolah gagasan “ekskursioner” belum didefinisikan secara tuntas sehingga diperlukan penjelasan akademik maupun praksis. Persoalan itu akhirnya memicu rasa keingintahuan untuk mengerjakan riset ini. Pelacakan dimulai dengan membaca historiografi maupun karya sastra yang pernah ditulis Nugroho Notosusanto. Terdapat beberapa buku yang relevan dan layak dipakai sebagai rujukan dalam melacak jaringan ide, di antaranya buku *Sedjarah dan Sedjarawan* (1964). Pada sub bagian guna sejarah, Nugroho Notosusanto memaparkan prinsip kerja “ekskursioner” sebagai salah satu elemen konfigurasi antara kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nugroho Notosusanto menjelaskan sejarah berguna sebagai sarana edukasi, yaitu “memberi pelajaran” (Notosusanto, 1964). Belajar dari peristiwa atau jejak masa lampau. Pada konteks ini, Nugroho menegaskan bahwa peristiwa masa lalu tidak berulang. Kesimpulan yang diperoleh dari peristiwa sejarah dapat difungsikan sebagai pelajaran.

Guna sejarah berikutnya adalah “memberi inspirasi”. Penjelasan terhadap guna sejarah yang kedua tersebut, Nugroho Notosusanto meminjam pernyataan Prijono (Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan) ketika berpidato pada pembukaan Seminar Sejarah tahun 1957. Pelajaran sejarah nasional disebut sebagai salah satu alat penting menumbuhkan atau mempertebal spirit nasionalisme dan patriotisme. Sultan Hamengkubuwono IX, sebagai tuan rumah kegiatan seminar menyampaikan gagasan tentang esensi sejarah sebagai sumber semangat bagi generasi mendatang (Notosusanto, 1964).

Nasionalisme bukan hal baru, namun sebagai fenomena historis yang manifestasinya *lumrah* hadir di setiap periode sejarah manusia (Hobsbawm, 1991). Dalam konteks Indonesia, terminologi nasionalisme tidak sekedar bentuk perlawanan atas dominasi kolonialisme. Nasionalisme Indonesia perlu dicermati kembali relevansinya, terutama yang berpangkal pada keberagaman etnis. (Purwanto, 2001)

Artikel yang ditulis Fajar Desca Nugraha bisa digunakan sebagai salah satu evidensi saat peneliti bereksperimen memposisikan sejarah lokal sebagai sarana meningkatkan spirit nasionalisme dalam pembelajaran sejarah. Riset itu mengeksplorasi pemanfaatan potensi cagar budaya yang melimpah di lingkungan tempat tinggal siswa SMAN 1 Soreang. Dia mengutip pemikiran I Gde Widja (1991), bahwa sejarah lokal merupakan studi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat atau komunitas dari lingkungan sekitar (*neighborhood*). Istilah sejarah lokal juga dapat dimaknai sebagai sejarah regional, Asia Tenggara (Nugraha, 2013).

Contoh lain dapat dijumpai pada karya Arya Sunu dan Mudana. Kedua penulis memiliki ketertarikan meneliti Desa Pakraman sebagai contoh masyarakat multietnis berhasil mengakomodasi warga beragama Hindu dan non-Hindu dengan cara awalnya dibedakan antara "warga *muwed* (asli)" dan "warga tamiu (pendatang)". Sejak awal desa Pakraman diproyeksikan sebagai desa religius. *Awig-awig* merupakan pedoman dasar, bentuk produk hukum tradisional yang berlaku di desa Pakraman. Warga desa non Hindu yang terdiri dari etnis Tionghoa, Jawa, Madura secara administrasi dimasukkan dalam kategori "warga desa dinas". Mereka secara faktual mendapat fasilitas dari negara meski usia kelahirannya lebih muda dibanding Pakraman. Namun, dari perspektif kultur setempat, penduduk asli Pakraman dipercaya memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding masyarakat pendatang. Dalam praktik kehidupan bersama berikutnya, muncul sikap arogansi di antara masyarakat Pakraman dengan dinas dan berpeluang terjadi konflik (Arya, 2014).

Lambat laun, masyarakat desa Pakraman maupun dinas berhasil mengelola konflik sehingga mencapai keharmonisan. Dampak ikutan yang diciptakan kemudian adalah lahir terminologi "satu badan dua kepala". Potensi geografis dan legalitas hukum yang dimiliki kedua desa tersebut justru bisa dimanfaatkan sebagai pusat orientasi khususnya bagi masyarakat tempatan di Bali. Terlepas dari sisi kekurangan dalam aspek teknik pengelolaan, namun konsep kerukunan, toleransi, serta persatuan, konseptualisasi praktik hidup Pakraman dan desa dinas layak diapresiasi lebih luas dalam perspektif "nasional" Indonesia (Arya, 2014).

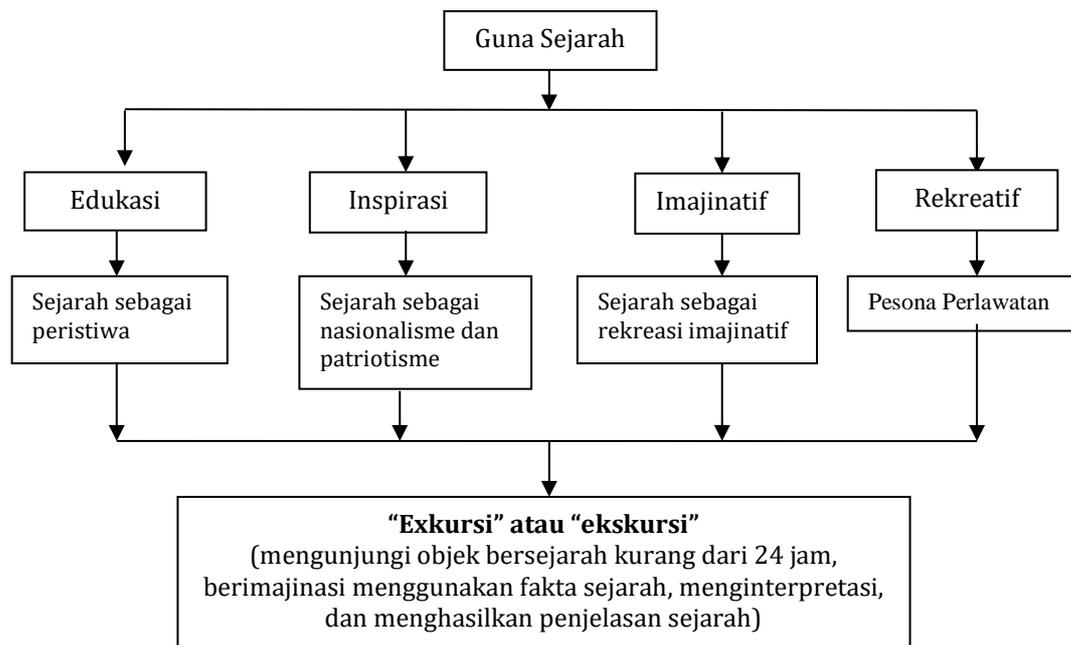
Dalam konteks lain, I Wayan Mudana juga menemukan penawar konflik berupa ajaran *Tat Twam Asi* (pencerminan cinta kasih universal), Tri Karya Parisudha, *Karma Phala, Yadnya*, Guru Bhakti, dan lainnya. Selain itu, terbukti bahwa posisi *Kuren* (keluarga inti) turut memainkan peran strategis sebagai pengendali sosial. Model kontrol sosial lainnya berbentuk kegiatan sosialisasi, *dadia*, pemanfaatan media kentongan/*kulkul*, pengeras suara, serta bahasa (Mudana, 2012).

Potensi keragaman etnis yang dimiliki bangsa Indonesia sangat melimpah. Nugraha, Arya Sena, dan Mudana bisa disebut memiliki kepekaan memanfaatkan fakta sosial budaya yang tumbuh di masyarakat untuk mengembangkan pengajaran sejarah atau kewarganegaraan. Setidaknya, kerja riset mereka telah memanasifasikan perjalanan "ekskursion" agar memanfaatkan tempat bersejarah yang letaknya di sekitar tempat tinggal siswa. Dalam konteks itu, fungsi sejarah sebagai sumber inspirasi pun idealnya dapat dikerjakan oleh semua khalayak. Sumber inspirasi tidak hanya bertema kepahlawanan, namun juga beragam aktivitas sosial-kultural seperti yang berlangsung di Soreang, desa Pakraman, desa dinas, atau di lingkungan terdekat sehingga memerlukan biaya dalam jumlah tinggi untuk menjangkaunya.

Guna sejarah yang ketiga adalah "memberi kesenangan". Bentuk rasa senang diilustrasikan seperti suasana hati ketika seseorang menikmati karya sastra yang berhasil (Notosusanto, 1964). Bentuk kedua dekat dengan fungsi sejarah sebagai infrastruktur rekreasi imajinatif. Siswa dapat mengeksplorasi rasa senang dengan cara melakukan "pesona perlawatan", melakukan ritual perjalanan imajiner ke "masa lalu" dengan harapan kemudian memperoleh fungsi rekreatif sebagai unsur "senang".

Dalam konteks sejarah sebagai unsur rekreatif, Nugroho Notosusanto secara tidak langsung memberi keterangan bahwa terminologi “pesona perlawatan” sinonim dengan “ekskursion”. Fungsi rekreatif pada penulisan teks cerita sejarah dimaknai sebagai pendidikan atas unsur keindahan yang ditemukan saat melaksanakan “pesona perlawatan”. Rasa senang tumbuh seiringan dengan aktivitas mempelajari dan menulis sejarah. Kalau yang dipelajari berkaitan dengan sejarah naratif dan isi kisahnya mengandung hal-hal yang terkait dengan keindahan, dengan romantisme, maka akan melahirkan kesenangan estetis. Tanpa beranjak dari tempat duduk, seseorang yang mempelajari sejarah dapat menikmati bagaimana kondisi saat itu. Jadi, seolah-olah seseorang tadi sedang berekreasi ke suasana yang lalu.

Prinsip Kerja “Ekskursion”



Peristiwa yang berlangsung di sektor kepariwisataan seperti dilaporkan jurnalis *inijabar.com* mengindikasikan salah satu contoh konkrit, yaitu praktik transformasi terminologi beserta dampaknya. Inayatullah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, menerbitkan Surat Keputusan nomor 421.71/Kep43.Disdik/I/2020 tentang pedoman penyelenggaraan *study tour* (karya wisata, *outing class*, studi wisata, studi pengenalan lingkungan, *study* budaya, dan widya wisata) bagi siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama kota Bekasi. Hal ini dilakukan untuk menekankan pesan bahwa *study tour* bersifat tidak memaksa atau tidak wajib dan dilarang mencari keuntungan pribadi. Keputusan itu dibuat agar tidak ada pihak yang terbebani karena sumber pembiayaan utama kegiatan berasal dari orang tua siswa.

Kabar yang datang dari Dinas Pendidikan Bekasi juga dapat dibaca sebagai contoh perluasan konsep *ekskursion* ke bentuk baru, *study tour*. Kolaborasi antara kebutuhan kognitif pembelajaran sejarah dengan elemen wisata ketika berinteraksi dengan aspek komersial dalam aktivitas pendidikan. Dalam persoalan itu diperlukan koordinasi secara profesional bahkan sinergitas antara birokrat, orang tua, dan instansi swasta (baca: biro perjalanan wisata).

Mary Ann DeMello memiliki hasil riset disertasi yang signifikan untuk dicermati karena membahas tentang bagaimana memadukan konsep *study tour* dengan pendidikan. Mary Ann

menganalisa dampak *study tour* (studi wisata) yang diselenggarakan di kancah internasional sehingga berimplikasi pada perubahan pikiran secara global. Perubahan didasarkan pada praktik pengalaman belajar dan refleksi. Riset dikerjakan setelah mengacu penelitian terdahulu yang kajiannya berakibat membentuk kinerja kewarganegaraan, wawasan dunia, budaya, serta perspektif dunia masa depan. Produk luaran riset salah satunya adalah instrumen untuk mengukur pemikiran global.

Mary Ann menganalisa dampak *study tour* (studi wisata) di kawasan internasional pada perubahan pikiran secara global. Perubahan didasarkan pada praktik pengalaman belajar dan refleksi. Riset dikerjakan dengan mengacu penelitian terdahulu dan kajiannya difokuskan hingga meninjau kinerja kewarganegaraan, wawasan dunia, budaya, serta perspektif dunia masa depan. Hasilnya adalah instrumen untuk mengukur pemikiran global, mereformasi sistem pendidikan untuk memenuhi tantangan teknologi dan informasi di Amerika Serikat. Mary Ann juga menangkap pesan pentingnya memobilisasi guru dalam program pengembangan profesional yang efektif untuk mempromosikan perspektif global di kelas. Maka, *study tour* internasional memberikan pilihan penting dalam pengembangan profesional guru. *Study tour* dalam cakupan internasional didefinisikan sebagai perjalanan ke luar negeri yang dipimpin oleh seorang profesor, administrator, atau spesialis perjalanan (Demello, 2011).

Konsep “ekskursion” ternyata bukan sekedar perjalanan wisata. Kerangka pemikiran “ekskursion” bersandar pada kebutuhan mengeksplorasi “kenyataan” untuk melahirkan disiplin intelektual. Siswa mendapat ruang mengasah keseimbangan kemampuan kognitif (pengetahuan), psikomotorik (analisa), dan afektif (nilai). Pendidikan sejarah yang selama ini hanya bicara tentang nilai normatif dan mengesampingkan keilmuan, sekarang saatnya untuk *care to the future*. Makna ekskursion makin luas ketika mengangkat tema inspirasi (dan relevansi) yang artinya juga menuju kepada pemikiran kekinian dan masa depan (Purwanto, 2020).

Pesan persuasif yang ditulis di halaman prakata buku SNI untuk SMP berikut ini, perlu mendapat perhatian khusus:

“..... sejarah adalah suatu kisah, karena itu penyajiannya harus hidup dan menarik. Pada waktu libur, perlu para pelajar dibawa pada ekskursion-ekskursion untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di dalam daerah masing-masing.” (Notosusanto, 1978)

Mengapa pelajar SMP dipilih dan secara spesifik direkomendasikan melakukan “ekskursion”, dan bukan dimulai di jenjang SMA? Apa pula yang menjadi alasan bahwa perjalanan ekskursion penting dilakukan pada “waktu libur”. Asumsinya, jika kegiatan sekolah dilaksanakan di waktu libur maka pihak sekolah atau keluarga bisa diposisikan sebagai inisiator dan penanggungjawab ekskursion. Dua pertanyaan tersebut menarik untuk ditelusuri meski tidak dideskripsikan secara detil dalam SNI untuk SMP.

Pelajar di jenjang SMP dalam buku *Psikologi Belajar* dikategorikan sebagai remaja awal dengan rentang usia 12/13 sampai 17/18 tahun. Masa transisi dari periode “ambang pintu masa remaja” ke “remaja awal dan akhir”, maka sering dikonotasikan sebagai masa pencarian dan penjelajahan identitas diri. Anak remaja diasumsikan belum menguasai fungsi fisik maupun psikis, tetapi butuh pengakuan dan penghargaan. Namun, hal penting yang perlu diperhatikan bahwa anak usia antara 12 sampai 18 tahun mampu berdiri sendiri, melaksanakan tugas seperti yang dilakukan orang dewasa, dapat bertanggungjawab atas sikap dan perbuatan yang dikerjakannya. Oleh karena itu, kepercayaan atas diri anak remaja diperlukan agar mereka merasa dihargai (Djamarah, 2015).

Pembelajaran sejarah idealnya diberikan berdasarkan kategori usia individu. Kuntowijoyo memilah usia ke dalam empat kategori. Siswa dalam kategori Sekolah Dasar (SD) belajar sejarah

menggunakan pendekatan estetika. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) diterapkan pendekatan etik, sedangkan untuk siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) diterapkan pendekatan berpikir kritis. Pengetahuan sejarah untuk aras perguruan tinggi penyajiannya semakin lengkap karena mahasiswa mulai mempelajari perubahan dalam masyarakat (Kuntowijoyo, 2013).

Nugroho Notosusanto dan tim penulis SNI agaknya menangkap esensi kebutuhan pelajar dalam pendekatan psikologis, yaitu berdasarkan kategori usia. Materi buku SNI diproduksi untuk membekali lulusan SMP ketika terjun ke masyarakat andaikata mereka tidak berencana melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kerangka pikir semacam itu disebut sebagai proses individualisasi, tujuannya menyosialisasikan individu muda pada tata kehidupan bersama. Dalam konteks itu, pendidikan dipahami sebagai proses "*nyantrik*" seorang individu agar dapat hidup sesuai kaidah yang berlaku di masyarakat. Cabang-cabang ilmu dipahami kepada individu peserta *nyantrik* agar kelak, ketika sampai pada kategori usia biologis dan sosial yang dianggap siap, individu muda dapat berperan sebagai anggota-penuh masyarakat, sebagai individu dewasa. Jadi, belajar bukan untuk sekolah, tetapi untuk hidup (Suwignyo, 2019).

Jenjang SMP merupakan tahap ketika individu mengenal fakta sejarah, dan dari mana fakta tersebut berasal. (Purwanto, 2020) "Exkursi" bisa menjadi peluang bagi pelajar SMP mengenal secara langsung fakta sejarah. Bahkan, jika proses awal memperkenalkan fakta sejarah dimulai sejak dini, maka dapat diterapkan bagi siswa SD melalui pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Nengah Pariani bersama tim penulis memiliki gagasan bertema metode *outdoor study* sebagai metode yang diargumentasikan berpengaruh pada sikap sosial dan ekologis siswa SD. *Outdoor study* yang dimaksud Pariani didefinisikan sebagai sebuah inovasi pembelajaran yang mampu mendorong gairah belajar karena dilakukan sambil menikmati keindahan alam di lingkungan sekitar. Gagasan itu menjadi alasan mengapa belajar di luar ruang kelas menjadi penting dilakukan agar pelajaran IPS lebih bermakna dan berkesan bagi siswa. Pariani dan tim juga menegaskan bahwa *outdoor study* yang dilakukan menggunakan infrastruktur sistem pertanian Subak di Bali hasilnya "unggul" dibanding metode "konvensional" (Pariani et al., 2021).

Temuan riset yang dipublikasikan oleh Pariani penting untuk ditelaah lebih luas. Atmosfer ekologis diyakini sebagai salah satu metode yang tepat dalam mempraktikkan materi pelajaran IPS. Konsep *outdoor study* yang dikonsepsikan Pariani tidak identik dengan "ekskursi" yang dibayangkan Nugroho Notosusanto. Akan tetapi, jika konsep "ekskursi" ala Nugroho Notosusanto diolah lalu dikonstruksikan ulang ke dalam wadah *outdoor study* berbasis Subak tentu hasilnya lebih maksimal. Guru IPS bersama siswa SD secara aktif belajar memaknai "Subak" sebagai fakta sejarah, realitas ekonomi, sosial, serta budaya. Aktivitas tersebut penting dilakukan untuk mengimajinasikan dan menginspirasi "Subak" secara kreatif, bukan sekedar menjalankan ritual mengunjungi destinasi wisata, objek pengamatan atau glorifikasi atas warisan bangsa.

Praktik ber-ekskursi yang dilakukan pada waktu libur dapat dimaknai sebagai keleluasaan untuk memilih destinasi yang mudah dijangkau tanpa mengganggu agenda kurikulum resmi, tidak menuntut biaya tinggi, alokasi waktu bisa sangat fleksibel, dan yang menarik adalah bisa diatur secara mandiri atau kolaboratif. Fakta-fakta yang dinarasikan dalam buku SNI untuk SMP masih sangat spesifik fokus pada "tokoh utama", seperti kasus gerakan melawan pemerasan pada abad 19 yang berlangsung di beberapa tempat yaitu Ciomas (lereng Gunung Salak), Ciampea, Pamanukan, Ciasem, juga di Slipi Tanah Abang, Condet Pasar Rebo Jakarta, Tangerang, Surabaya, Demak, dan berbagai tempat lainnya. Aktor utama yang didokumentasikan dalam naratif historiografi SNI adalah aktor utama, contohnya Entong Gendhut, Maliki, dan Modin, para jawara Condet yang melawan bentuk penindasan ekonomi para tuan tanah kepada petani (Notosusanto, 1985). Gerakan atau pemberontakan atas kehidupan sosial ekonomi semacam itu adalah realitas keseharian yang memiliki relevansi dengan masa kini.

Praktik "ekskursion" atau "pesona perlawatan" yang berlangsung maksimal 24 jam di sekitar tempat tinggal patut diperhitungkan agar siswa bisa mengobservasi, mengimajinasikan, lalu menginspirasi jejak masa lalu hingga memproduksi penjelasan sejarah (*historical explanation*). Tahapan tersebut perlu dilakukan oleh siswa maupun guru sebagai usaha membuat unit sejarah *intelligible*, artinya dimengerti secara cerdas. (Kuntowijoyo, 2008) Konsep "penjelasan sejarah" yang diberikan Kuntowijoyo relevan untuk diadopsi dalam rangka menghidupkan roh "ekskursion"-nya Nugroho Notosusanto.

Bagaimana cara kerja *historical explanation*? Kuntowijoyo menjelaskan secara detil dalam pengantar bukunya, bahwa kita (baca: siswa dan guru) melakukan "wisata akademik", yaitu mengamati bagaimana sejarawan bekerja (*historian at work*). Kuntowijoyo juga membekali kita dengan "panduan wisata" berupa "review" konkret atas beragam kerja sejarawan. Sebagaimana dijelaskan pada halaman viii buku *Penjelasan Sejarah* (2008), Kuntowijoyo berpesan agar kita mengaktivasi "hak", sehingga punya kesempatan membicarakan persoalan kontemporer. Sejarawan muda (tentu termasuk pelajar SMP) yang akan menekuni dunia kerja bidang pertukangan, perikanan, perusahaan, pabrik, atau bentuk usaha lain, tetap dapat menjadi "sejarawan".

Terminologi ekskursion dan pesona perlawatan nampaknya mengalami stagnasi di ruang naratif historiografi SNI untuk SMP. "Pesona Perlawatan" sebagaimana yang diangankan Nugroho Notosusanto tidak diadopsi pemerintah paska Orde Baru. Program tahunan seperti Lawatan Sejarah Nasional (Lasenas) yang digelar pertama kali pada tahun 2003 oleh Direktorat Sejarah, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata adalah bentuk baru yang hadir paska Orde Baru. Konsep "lawat(an) yang dihadirkan tidak menunjukkan koneksi ideasional dengan ekskursion dari Nugroho Notosusanto. Pilihan utama destinasi kesejarahan yang diagendakan fokus pada situs-situs bersejarah berorientasi perjuangan dan persatuan untuk memperkokoh integrasi bangsa. Prioritas sasaran seperti misalnya tempat pengasingan dan atau makam pejuang bangsa. Situs itu sebagai simbol simpul perekat bangsa.

Peserta Lasenas adalah siswa dan guru (pendamping siswa) dengan predikat terbaik dari seluruh propinsi di Indonesia. Selama beberapa kali program Lasenas yang didesain oleh "negara" memilih sasaran bidik siswa usia remaja akhir (tingkat SMA). Keseimbangan antara kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik menjadi kebutuhan mendesak khususnya bagi pelajar di usia remaja awal.

Lasenas yang lahir sesuai jiwa jaman paska Orde Baru patut diapresiasi. Meski sangat disayangkan program yang berlangsung sejak 2003 harus berakhir di tahun 2018. Peristiwa itu menjadi momentum bersejarah karena sebagai program terakhir versi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, setidaknya telah mengisi celah kandasnya "ekskursion Orde Baru". Lasenas (tentu) telah berhasil menggoreskan kenangan inspiratif bagi siswa dan guru sejarah SMA dalam membangun kultur berpikir sejarah. Meski agak ironis, kegiatan paripurna Lasenas 2018 terkendala teknis sehingga "tak berkesan" (Arman, 2018).

Program Lasenas bertujuan mendukung pembelajaran sejarah agar lebih efektif dengan cara berekreasi. Selain tujuan edukatif, siswa diharapkan juga memperoleh inspirasi agar dalam bersikap dan perilaku berbekal nilai-nilai sejarah, seperti nilai-nilai kepahlawanan, pantang menyerah, tahan uji, cinta Tanah-Air, persatuan, dan solidaritas. Melalui Lasenas, siswa dilatih menginterpretasi secara kontekstual agar mampu menghindari anakronisme dalam memahami sejarah (Zuhdi, 2006). Susanto Zuhdi menyebutkan pentingnya mengapresiasi keragaman sebagai solusi mengatasi masalah bangsa dalam konteks persatuan. Gagasan itu menggunakan rujukan utama pemikiran Sartono Kartodirdjo:

“Jika pernyataan keempat dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 boleh ditambahkan, maka akan berbunyi putera puteri Indonesia akan menjunjung tinggi sejarah yang satu, sejarah Indonesia” (Zuhdi, 2006).

Sartono menekankan pentingnya fungsi sejarah sebagai pembentukan bangsa. Kehadiran istilah “lawatan sejarah” membuktikan berlangsungnya proses transformasi diksi serta makna yang diasumsikan dipengaruhi oleh interkoneksi berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, arkeologi, antropologi, ekonomi, psikologi, hukum, dan kepariwisataan.

4. Simpulan dan Saran

Konsep “ekskursion” yang diperkenalkan Nugroho Notosusanto pada masa Orde Baru, kandas tak berbekas. Namun, jejaknya masih terlacak. Beberapa karya Nugroho Notosusanto mengindikasikan konsep yang maknanya identik dengan “ekskursion”, yaitu konsep “pesona perlawatan” dan guna sejarah. Di bidang kepariwisataan, istilah “ekskursion” mengalami transformasi, muncul diksi baru seperti *study tour*, lawatan sejarah, dan istilah lain yang maknanya se-tipe namun esensinya saling kait melindan. Makna edukasi pun mulai dikemas dalam wujud komersial. Perlu ada keberanian masyarakat akademik (sejarawan) mengkaji ulang konsep “ekskursion”. Belajar dari sejarah Lasenas 2018, gagasan “ekskursion” yang pernah lahir di masa Orde Baru layak dipertimbangkan dan dihidupkan kembali. Dalam konteks itu, fungsi *engagement* atas gagasan “ekskursion” efektif dipraktikkan untuk mengkonstruksi kultur berpikir sejarah kritis, membangun logika sejarah dengan cara menelaah hubungan peristiwa di tingkat mikro dengan makro. Praktik pendidikan dan pembelajaran sejarah dipraktikkan dengan cara membuka kemerdekaan berpikir siswa melalui aktivitas berimajinasi, menginterpretasi, hingga mampu membuat penjelasan atas peristiwa sejarah. Dengan demikian, konsep “ekskursion” tak kan kandas!

Ucapan terima kasih

Tulisan ini merupakan bagian dari naskah disertasi. Terima kasih kepada tim promotor, yaitu Prof. Dr. Bambang Purwanto, M.A (promotor) dan Dr. Agus Suwignyo, M.A (co-promotor) untuk ide yang diberikan sehingga penulis memiliki kemampuan mengkonseptualisasikan fakta sejarah. Interpretasi serta imajinasi kreatif yang diberikan tim promotor berhasil memotivasi penulis dalam mengkonstruksi konsep “ekskursion”. Hal ini bermanfaat sebagai langkah praktis membaca naratif sejarah bangsa (Indonesia).

Daftar Pustaka

- Arman, D. (2018). Kunjungi 12 Obyek Sejarah, Penutupan Lasenas tak Berkesan. <https://Kebudayaan.Kemdikbud.Go.Id/Bpnbkepri/Kunjungi-12-Obyek-Lawatan-Penutupan-Kegiatan-Tak-Berkesan/>.
- Demello, M. A. (2011). *The impact of study tours in developing global-mindedness among pk-12 educators in Southeastern Massachusetts. A dissertation presented.*
- Djamarah, S. B. (2015). *Psikologi Belajar* (Vol. 3). PT Rineka Cipta.
- Hobsbawm, E. J. (1991). *Nations and Nationalism since 1780 Programme Myth, Reality*. Cambridge University Press.
- Hoeffler, C. (n.d.). *Teaching Strategy Teaching H to High! Undergrad.* <http://about.jstor.org/terms>
- <https://kbbi.web.id/ekskursion>. (n.d.).
- Inskeep, E. (1991). *Tourism Planning an Integrated and Sustainable Development Approach* (1st ed., Vol. 1). Van Nostrand Reinhold.

- Kartidirdjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (S. Pusposaputro, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, S. (2017). *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia* (2nd ed.). Ombak.
- Ketut Arya S, I. G. S. D. B. & . S. W. (2014). Harmonisasi, Integrasi Desa Pakraman dengan Desa Dinas yang Multietnik dan Multiagama menghadapi Pergeseran, Pelestarian, dan Konflik di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 446–458. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/viewFile/4469/3442>
- Kuntowijoyo. (2008). *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)* (1st ed., Vol. 1). Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah* (1st ed., Vol. 1). Tiara Wacana.
- Mudana, I. W. (2012). Modal Sosial dalam Pengintegrasian Etnis Tionghoa pada Masyarakat Desa Pakraman di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 30–40. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/download/4494/3467>
- Notosusanto, N. (1964). *Sedjarah dan Sedjarawan* (1st ed., Vol. 1). Balai Pustaka.
- Notosusanto, N. & B. Y. (1985). *Sejarah Nasional Indonesia untuk SMP Jilid II* (2nd ed., Vol. 4).
- Notosusanto, N. dan B. Y. (1978). *Sejarah Nasional Indonesia untuk SMP Jilid III* (Nugroho Notosusanto dan Yusmar Basri, Ed.; 2nd ed., Vol. 1). Balai Pustaka.
- Nugraha, F. D. (2013). "Kunjungan Sejarah Lokal Peninggalan Preanger Stelse di Kabupaten Bandung untuk Meningkatkan Rasa Nasional". *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Pendidikan Sejarah se-Indonesia*. 39.
- Nurita, D. (2020). Kemendikbud Bantah Mata Pelajaran Sejarah Keluar dari Kurikulum. <https://Nasional.Tempo.Co/Read/1387913/Kemendikbud-Bantah-Mata-Pelajaran-Sejarah-Keluar-Dari-Kurikulum>.
- Pariani, N., Sriartha, I. P., & Kertih, I. W. (2021). Pengaruh Metode Outdoor Study Berbasis Subak Dalam Pembelajaran IPS Terhadap Sikap Sosial Dan Sikap Ekologis Siswa Sekolah Dasar Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 106. <https://doi.org/10.23887/mkfis.v20i2.35911>
- Purwanto, B. (2001). Memahami Kembali Nasionalisme Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(3), 234–264.
- Purwanto, B. (2020). Diskusi Sejarah: Pentingkah Guru Sejarah memahami Historiografi. In *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Purwanto, B. (2021). *Materi Kuliah Umum*.
- Sardiman, A. M. (2015). Menakar Posisi Sejarah Indonesia pada Kurikulum 2013. *Istoria Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(2). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.21831/istoria.v11i2.7555>
- Suwignyo, A. (2019). *Pendidikan, Kekuasaan, dan Kolonialisme* (Arya, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Selarung Institute.
- Umasih. (2014). Ketika Kebijakan Orde Lama memasuki Domain Pendidikan: Penyiapan dan Kinerja Guru Sekolah Dasar di Indonesia. *Paramita*, 24(2), 104–113.
- Zuhdi, S. (2006). *Lawatan Sejarah - Merajut Simpul - _simpul Perekat Keindonesian_(Susanto_Zuhdi)*. Kompas.